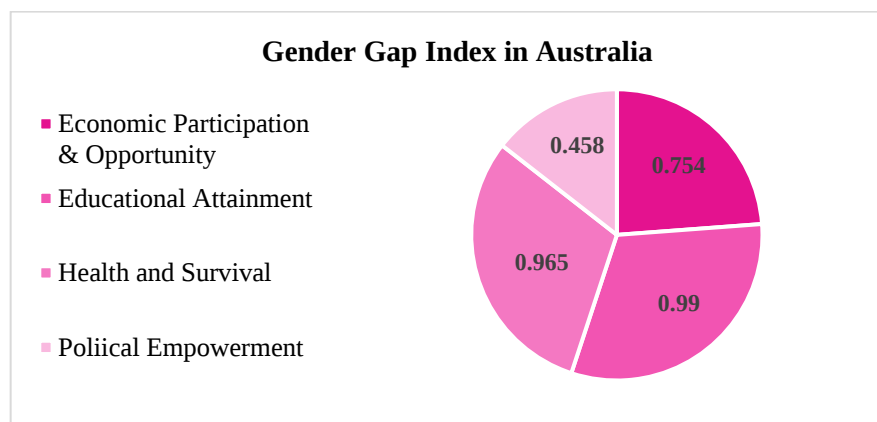


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Australia merupakan salah satu negara yang secara konsisten menempatkan kesetaraan gender sebagai prinsip utama dalam kebijakan domestik maupun kebijakan luar negerinya. Komitmen tersebut tercermin dalam kerangka hukum dan kebijakan publik Australia yang secara eksplisit bertujuan untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai aspek masyarakat (DFAT, 2022). Australia sendiri sudah cukup berhasil dalam menangani kesetaraan gender di dalam negeri, dimana Australia mendapatkan peringkat ke-13 dari 148 negara dalam *Global Gender Gap Index Report* dengan skor rata-rata 0,792 di sektor ekonomi, politik, kesehatan, dan pendidikan (WEF, 2025). Australia menempatkan kesetaraan gender sebagai permasalahan yang mempengaruhi stabilitas dan pembangunan tidak hanya di dalam negara namun juga dalam kebijakan dan kerjasama luar negerinya.



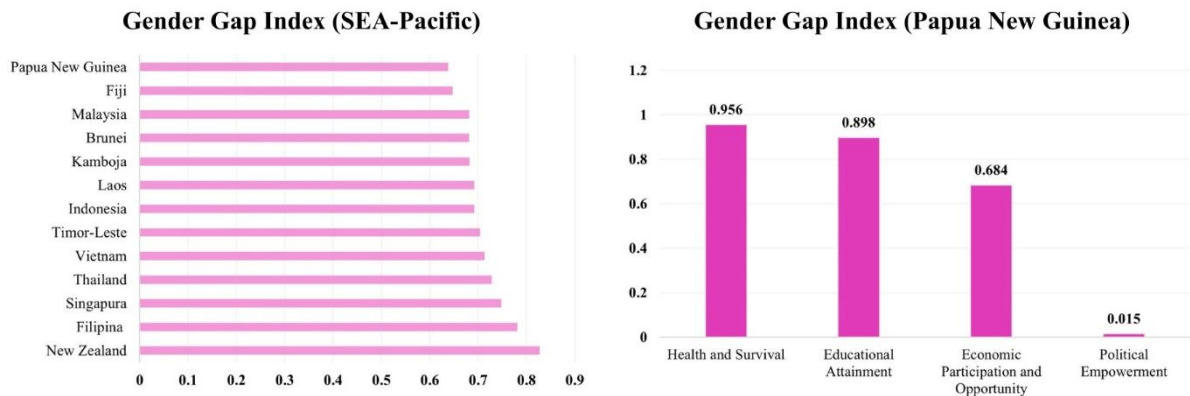
Gambar 1. 1 Gender Gap Index in Australia
Sumber: Diolah Oleh Penulis

Di tengah komitmen tersebut, ketidaksetaraan gender menjadi sebuah permasalahan global yang masih menjadi hambatan yang signifikan di berbagai negara. Menurut *Gender Gap Report* tahun 2025, kesetaraan gender di 148 negara hanya baru tercapai sekitar 68,8% dan diperkirakan membutuhkan sekitar 123 tahun lagi untuk mencapai kesetaraan gender penuh. Pada tahun 2025, ketidaksetaraan gender dalam aspek kesehatan dan pendidikan sebagian besar hampir teratasi dengan masing-masing negara mencapai lebih dari 95%, namun untuk ketidaksetaraan gender dalam partisipasi ekonomi hanya sekitar 61% dan pemberdayaan politik 22,9% yang teratasi (WEF, 2025). Oleh karena itu, ketidaksetaraan gender patut diakui sebagai masalah struktural global yang memerlukan komitmen internasional yang terkoordinasi (Moulabuksh et al., 2021). Australia merupakan negara yang berkomitmen kuat dalam mendorong kesetaraan gender di tingkat global dalam upaya kebijakan dan bantuan luar negeri.

Upaya tersebut termasuk dalam *Gender Equality and Women's Empowerment Strategy* merupakan sebuah strategi yang memposisikan kesetaraan gender sebagai pusat seluruh kebijakan luar negeri, diplomasi dan juga bantuan luar negeri Australia yang diterbitkan pada tahun 2016 oleh *Department of Foreign Affairs and Trade* (DFAT) (DFAT, 2016). Strategi tersebut mencerminkan pandangan Australia terhadap ketidaksetaraan gender sebagai permasalahan struktural yang tertanam dalam sistem ekonomi, sosial, politik dan juga sebagai kunci dalam pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, kesejahteraan masyarakat dan stabilitas regional, terutama di kawasan Indo-Pasifik. Strategi ini memiliki tiga poin utama yaitu, (1)mendorong hak perempuan untuk bersuara dan

ikut serta dalam pengambilan keputusan, kepemimpinan dan perdamaian, (2)mempromosikan kesejahteraan perempuan dalam bidang ekonomi melalui akses terhadap pasar, finansial, dan lapangan pekerjaan, serta (3)menghentikan kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak melalui penguatan kebijakan, upaya pencegahan dan dukungan terhadap korban. *Gender Equality and Women's Empowerment Strategy* berlaku untuk semua kegiatan yang dilakukan oleh *Department of Foreign Affairs and Trade* (DFAT) (DFAT, 2016).

Data Gender Gap Report 2025 menunjukkan bahwa Papua Nugini berada di posisi terendah dengan skor 0,63 diantara negara-negara Asia Tenggara dan Pasifik lainnya yang menggambarkan ketidaksetaraan gender struktural mendalam (WEF, 2025). Papua Nugini menempati peringkat 133 dari 148 negara. Kasus ketidaksetaraan yang paling serius terlihat pada aspek politik (0,015). Dalam aspek ekonomi, tingkat partisipasi relatif tinggi (0,684), namun masih sangat kurang dibandingkan dengan negara kawasan Indo-Pasifik lainnya. Pada aspek edukasi, Papua Nugini tertinggal pada tingkat pendidikan menengah dan literasi perempuan (0,89), sementara aspek kesehatan sudah menunjukkan angka yang relatif lebih baik (0,95) dibandingkan aspek-aspek lainnya, tetapi masih menghadapi tantangan yang serius seperti terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan reproduksi (WEF, 2025). Data tersebut menegaskan bahwa Papua Nugini masih mengalami ketidaksetaraan gender yang besar dan membutuhkan bantuan yang komprehensif agar bisa mencapai kesetaraan gender.



Gambar 1. 2 Gender Gap Index in SEA-Pacific and Papua New Guinea (2025)
Sumber: Diolah Oleh Penulis

Australia secara konsisten menunjukkan dukungannya terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Papua Nugini dalam berbagai perjanjian dan kerjasama bilateral. Dalam kebijakan luar negerinya, Papua Nugini diposisikan sebagai mitra utama di kawasan Indo-Pasifik sehingga kerjasama pembangunan menjadi bagian dari upaya yang memperkuat kemitraan strategis kedua negara tersebut (DFAT, 2014). Dalam implementasi *Gender Equality and Women's Empowerment Strategy*, Australia menekankan pentingnya bantuan inklusif, yang mengutamakan kesetaraan gender dan penguatan kapasitas lokal sebagai bagian dari agenda pembangunan dan stabilitas kawasan (DFAT, 2016). Bantuan-bantuan tersebut umumnya dilakukan melalui program kerjasama seperti *Australia's – Papua New Guinea Development Partnership Plan* dan *Australia NGO Cooperation Program* (ANCP) yang mencakup program-program komprehensif yang bertujuan untuk mendorong kesetaraan gender di berbagai aspek seperti ekonomi, politik, kesehatan dan pendidikan.

Secara umum penelitian ini menggunakan metode kategorial untuk meninjau penelitian terdahulu yang terbagi ke dalam dua kelompok tulisan, yaitu (1) aktor internasional yang menangani isu terkait gender di Papua Nugini dan (2) bantuan luar negeri Australia yang berfokus pada gender di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik. Kelompok tulisan pertama mencakup penelitian oleh Apriani Anastasia Amenes dan Mariana Erny Buiney (2025) dengan judul “*Gender Equality Issues and United Nations Women (UN Women) in Papua New Guinea (PAPUA NUGINI)*” yang menyoroti peran UN Women dalam memberikan bantuan teknis, advokasi dan kerjasama institusional untuk mengurangi jumlah *Gender-Based Violence* (GBV) di Papua Nugini dan mendorong kesetaraan gender melalui peningkatan partisipasi politik perempuan, pemberdayaan ekonomi, dan perubahan norma sosial. Tulisan kedua yang berjudul “*USAID BERSAMA Project: Examining Gender Based Violence Prevention in Eastern Indonesia (Case Study: Sentani District, Papua)*” oleh Lea Yanora (2021) berfokus pada peran USAID sebagai aktor negara dalam mencegah *Gender-Based Violence* (GBV) di Papua dengan menyoroti program “USAID BERSAMA” yang mendorong perubahan perilaku masyarakat terutama keterlibatan tokoh lokal dalam memandang kasus GBV melalui Forum Group Discussion (FGD) dengan masyarakat lokal yang dibagi berdasarkan gender dan usia.

Kelompok tulisan kedua mencakup penelitian oleh Maylita Nisa Zainal (2018) yang berjudul “*Analysis of Gender Aspect on Australian Development Assistance toward Indonesia (2014-2017)*” yang menjelaskan tentang bantuan luar negeri Australia di Indonesia, di mana Indonesia menjadi mitra kunci dalam

implementasi *Gender Equality and Women's Empowerment Strategy* melalui berbagai program yang mendorong pemberdayaan perempuan Indonesia dalam bidang ekonomi, kepemimpinan, dan penghapusan kekerasan berbasis gender. Adapun penelitian yang berjudul “*Gender Empowerment in the Health Aid Sector: Locating Best Practice in the Australian Context*” oleh Sara Davies (2018) menyoroti bantuan luar negeri Australia ke tingkat regional Indo-Pasifik di sektor kesehatan. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa meskipun program-program kesetaraan gender Australia masih cenderung *gender-blind* dan pengarusutamaan gender seringkali terfragmentasi oleh pendekatan sektoral yang kurang memperhatikan dampak kebijakan kesehatan terhadap perempuan secara menyeluruh.

Berdasarkan kedua kelompok tulisan di atas, kelompok tulisan pertama mempermudah penulis untuk memahami pola keterlibatan aktor internasional dalam menangani isu kesetaraan gender di Papua Nugini, khususnya melalui program dan intervensi yang berfokus pada pemberdayaan perempuan dan penghapusan kekerasan berbasis gender. Kelompok tulisan kedua mempermudah penulis untuk menganalisis karakteristik dan orientasi bantuan luar negeri Australia yang berfokus pada isu gender terutama di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik literatur dalam kelompok tulisan ini memberikan pemahaman mengenai kebijakan strategi serta kecenderungan pendekatan Australia dalam mengintegrasikan isu kesetaraan gender dalam program bantuan luar negerinya. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, maka penulis menemukan celah penelitian berupa upaya pemerintah Australia dalam mendorong kesetaraan gender melalui

Gender Equality and Women's Empowerment Strategy di Papua Nugini dengan batasan mulai dari tahun 2016 hingga tahun 2025.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Bagaimana Upaya Pemerintah Australia dalam Mendorong Kesetaraan Gender Melalui *Framework Gender Equality and Women's Empowerment Strategy* di Papua Nugini (2016-2025)?”.

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Secara Umum

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk memenuhi tugas skripsi sebagai salah satu persyaratan kelulusan program Sarjana (S1) di Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial, Budaya, dan Politik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

1.3.2 Secara Khusus

Secara khusus, penelitian ini mendeskripsikan tentang upaya pemerintah Australia dalam menerapkan *Gender Equality and Women's Empowerment Strategy* ke dalam program bantuan luar negeri mereka, terutama di Papua Nugini, serta bagaimana kemudian bantuan tersebut membantu untuk mendorong kesetaraan gender di Papua Nugini dilihat dari 4 aspek utama yaitu, ekonomi, politik, pendidikan dan kesehatan. Dari penelitian ini, diharapkan para pembaca bisa mendapatkan Informasi tambahan mengenai topik terkait.

1.4 Kerangka Pemikiran

1.4.1 Bantuan Pembangunan (*Development Aid*)

Bantuan pembangunan atau *development aid* merupakan bentuk bantuan yang bertujuan untuk mendorong sistem perekonomian, kesejahteraan sosial dan pengurangan kemiskinan dari negara penerima. Lancaster mendefinisikan bantuan pembangunan sebagai pembangunan berfokus pada fungsi yaitu bantuan pembangunan sebagai sarana kepentingan diplomatis atau strategis dan bantuan pembangunan sebagai sarana untuk memenuhi tujuan pembangunan itu sendiri, yang mencerminkan nilai altruisme (bantuan sebagai tindakan sukarela yang mementingkan kepentingan negara penerima atas kepentingan nasional), kesejahteraan dan keadilan sosial, serta solidaritas internasional. Dalam implementasinya, kesejahteraan sosial merujuk pada upaya untuk mengatasi ketidakadilan struktural dan mengurangi berbagai bentuk ketidaksetaraan yang menghambat pembangunan, baik dalam aspek ekonomi, politik, kesehatan, maupun pendidikan, sehingga setiap individu memiliki akses yang setara terhadap sumber daya, kesempatan, layanan publik, serta partisipasi di masyarakat (Lancaster, 2007).

Bantuan pembangunan tidak hanya bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi namun juga untuk menghilangkan hambatan partisipasi, memperluas akses, dan mempromosikan kesetaraan sosial dan ekonomi yang merata. Menurut Lancaster, ada beberapa tujuan lain dari bantuan pembangunan salah satunya adalah mendorong demokrasi di negara penerima dengan asumsi bahwa sistem pemerintah demokratis dapat menghasilkan pertumbuhan yang lebih cepat dan stabil. Demokrasi dalam konteks bantuan pembangunan mencakup penguatan institusi politik, perlindungan hak politik dan sipil, serta mendukung partisipasi masyarakat dari negara tujuan. Bantuan pembangunan juga digunakan

untuk menangani isu-isu global termasuk permasalahan lingkungan seperti perubahan iklim, pemanasan global, serta upaya pencegahan pengobatan dan pengertian penyebaran penyakit menular seperti cacar, campak, polio, HIV/AIDS malaria dan tuberkulosis. Tujuan tersebut dilakukan melalui pendanaan riset, pembiayaan program konkret, pembangunan kapasitas, pelatihan dan melalui sarana lainnya (Lancaster, 2007).

Pada dasarnya, bantuan pembangunan mencakup berbagai intervensi yang bertujuan untuk memperkuat fondasi dari sistem ekonomi dan sosial negara penerima melalui dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, reformasi kebijakan, penguatan institusi, perluasan akses pendidikan dan layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, program pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kapasitas (Lancaster, 2007). Menurut Murphy, prinsip pembangunan dibangun dengan tujuan untuk menyediakan sistem yang lebih inklusif di dalam dunia internasional, terutama untuk mendukung kelompok termarginalisasi seperti perempuan. Kesetaraan gender merupakan salah satu prinsip dalam bantuan perkembangan, di mana bantuan-bantuan tersebut berpegang pada prinsip penghapusan permasalahan struktural seperti ketidakstaraan gender untuk mendorong akses terhadap ekonomi, kesehatan, edukasi yang setara (Murphy, 2005). Dengan demikian, bantuan pembangunan tidak bisa hanya berfokus pada satu bidang saja karena dalam proses pembangunan semua bidang saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain (Lancaster, 2007).

1.4.2 Kesetaraan Gender (Gender Equality)

Kesetaraan gender merupakan kondisi di mana laki-laki dan perempuan memiliki hak, tanggung jawab, kesempatan, serta akses yang sama di setiap aspek kehidupan seperti sosial, ekonomi dan lain-lain. Enrico di Bella dan Christian Suter dalam bukunya yang berjudul “*The Main Indicators of Gender (in) Equality*” menekankan bahwa menjelaskan bahwa kesetaraan gender dapat dipahami sebagai ketiadaan perbedaan sistematis dalam hasil yang diperoleh pria dan wanita di berbagai bidang kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Dengan kata lain, kesetaraan gender mengimplikasikan hasil dan kesempatan yang setara bagi pria dan wanita di dimensi-dimensi yang sama. Perspektif ini menyoroti bahwa kesetaraan gender tidak terbatas pada satu sektor tertentu, melainkan mencakup berbagai domain struktural masyarakat (di Bella & Suter, 2023).

Pada dasarnya, kesetaraan gender merupakan konsep yang multidimensional, mencakup setidaknya empat aspek utama: *economic participation and opportunity*, *political empowerment*, *education attainment* dan *health and well-being*. Aspek-aspek ini tertanam dalam definisi itu sendiri dan oleh karena itu menentukan ruang lingkup apa yang harus dievaluasi saat mengukur kesetaraan gender. Konsep tersebut juga menekankan bahwa pengukuran kesetaraan gender harus mempertimbangkan semua dimensi ini dan mencakup setidaknya satu indikator untuk masing-masing dimensi. Jika salah satu dimensi diabaikan, makna konseptual kesetaraan gender akan berubah, karena pengukuran tersebut tidak lagi mencerminkan cakupan penuh konsep tersebut (di Bella & Suter, 2023).

1.4.2.1 *Economic Participation and Opportunity*

Dalam aspek *economic participation and opportunity*, kesetaraan gender diukur melalui tingkat partisipasi perempuan dan laki-laki dalam lapangan pekerjaan dan kesetaraan upah dengan beban kerja yang sama. Selain itu, kesetaraan juga dilihat melalui representasi yang setara dalam posisi staff profesional/manajerial, partisipasi perempuan dalam posisi pekerjaan terampil, serta pemberian jatah cuti yang setara terutama cuti kehamilan bagi pekerja perempuan. Kesetaraan gender dalam aspek ekonomi juga mengukur kontrol atas sumber daya ekonomi bagi perempuan dan laki laki melalui indeks GINI (di Bella & Suter, 2023).

1.4.2.2 *Political Empowerment*

Dalam aspek *political empowerment*, kesetaraan gender digambarkan melalui kondisi dimana posisi perempuan sebagai pemimpin setara dengan posisi laki-laki, yang berarti perempuan mendapatkan perlakuan dan kehormatan yang sama selama menjalankan posisi mereka sebagai pemimpin. Kesetaraan gender dalam aspek politik meliputi, representasi perempuan sebagai pemimpin di parlemen, perempuan sebagai pemimpin dalam komunitas lokal/regional dan kesempatan yang seimbang antara perempuan dan laki-laki dalam posisi pengambil keputusan (di Bella & Suter, 2023).

1.4.2.3 *Education Attainment*

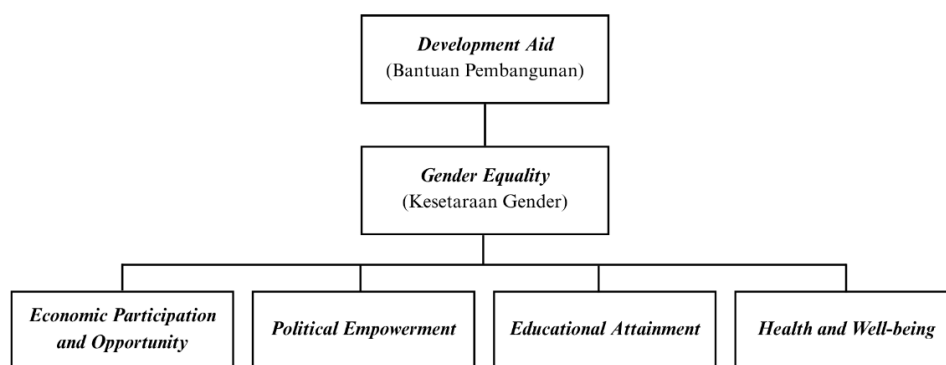
Dalam aspek *education attainment*, kesetaraan gender menggambarkan kondisi dimana seluruh lapisan masyarakat mendapatkan kesempatan pendidikan yang setara. Kesetaraan gender dalam aspek pendidikan umumnya dilihat melalui

angka literasi atau kemampuan membaca baik oleh kaum laki-laki maupun perempuan. Selain itu, kesetaraan gender juga dilihat melalui kesempatan yang setara di tingkat pendidikan primer, sekunder dan tersier (pendidikan tinggi) bagi siswa maupun siswi (di Bella & Suter, 2023).

1.4.2.4 *Health and Well-being*

Dalam aspek *health and well-being*, kesetaraan gender dilihat melalui kesetaraan harapan hidup bagi laki-laki dan perempuan. Pada dasarnya, perempuan cenderung memiliki risiko lebih besar untuk terjangkit penyakit kronis dan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan kesehatan reproduktif. Oleh karena itu, kesetaraan gender dalam aspek kesehatan juga dilihat melalui kesehatan reproduktif, tidak hanya bagi perempuan namun juga bagi laki-laki, serta akses terhadap fasilitas kesehatan umum dan kesehatan reproduktif. Indikator lain dari kesetaraan gender dalam aspek kesehatan adalah konsumsi gizi yang seimbang di kalangan masyarakat (di Bella & Suter, 2023).

1.5 Sintesa Pemikiran



Gambar 1. 3 Sintesa Pemikiran
Sumber: Diolah Oleh Penulis

Penelitian ini menggunakan konsep bantuan pembangunan (*development aid*) untuk menjelaskan peran Australia sebagai negara donor dalam

mengimplementasikan *Gender Equality and Women's Empowerment Strategy* strategi yang bertujuan untuk mendorong kesetaraan gender di Papua Nugini. Bantuan pembangunan yang dilakukan berbentuk program-program komprehensif, kebijakan dan kerjasama pembangunan yang bertujuan untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Sementara itu, konsep *gender equality* atau kesetaraan gender digunakan untuk menganalisis bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh Australia sudah memenuhi kesetaraan gender melalui 4 aspek utama yaitu ekonomi, politik, pendidikan dan kesehatan.

1.6 Argumentasi Utama

Sesuai dengan fokus dari penelitian ini, penulis berargumen bahwa Australia telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong kesetaraan gender di Papua Nugini melalui implementasi *Gender Equality and Women's Empowerment Strategy* dalam program bantuan luar negeri mereka. Upaya-upaya tersebut dilakukan oleh Australia melalui empat aspek utama kesetaraan gender yaitu *economic participation and opportunity*, *political empowerment*, *educational attainment* dan *health and well-being*. Aspek *political empowerment* mencakup program *Pacific Woman*, *PNG Women Lead*, dan *UNDP Strengthening PNG Parliament*, Australia berkontribusi dalam mendorong representasi perempuan dalam sektor politik serta mendorong suara perempuan dalam pengambilan keputusan. Dalam aspek *economic participation and opportunity*, Australia juga memiliki program seperti *Pacific Women Shaping Pacific Development program*, *Pacific Private Sectors Development Initiative*, *Market Development Facility (MDF)*, *Microfinance Expansion Project*, *Pacific Horticultural and Agricultural*

Market Access (PHAMA) dan beberapa program lainnya, yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam aspek *health and well-being*, Australia meluncurkan program *Keeping Girls in School Through Improved Reproductive and Menstrual Health*, *The Rural Primary Health Services Delivery Project*, *Sexual and Reproductive Health and Rights (SRHR C-Surge)*, *PNG Australia Transition to Health Program (PATH)*, yang berfokus dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan membangun layanan kesehatan yang kondusif terutama bagi kaum perempuan dan anak-anak dan juga program yang berfokus pada pembangunan infrastruktur yang bertujuan untuk menangani HIV. Dalam aspek *education attainment*, Australia melalui program beasiswa *Australian Awards* memberikan peluang kepada pelajar terutama perempuan dan kelompok rentan untuk menempuh pendidikan tinggi. Adapun program *Partnerships for Improving Education (PIE)*, *Australian Awards Scholarship (Gender Focused)*, *PNG Australia Secondary School Program*, *Anglicans In Development*, yang mendorong literasi dan numerisasi di kelas awal melalui investasi pendidikan yang memberikan perhatian khusus pada perempuan, penyandang disabilitas, serta perluasan akses pendidikan di Papua Nugini.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Metode analisis deskriptif bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi secara realistis, nyata, dan sesuai dengan kondisi saat ini. Penelitian ini melibatkan pembuatan uraian, gambaran, atau penjelasan secara sistematis, faktual, dan tepat mengenai fakta, karakteristik, serta hubungan antar fenomena yang menjadi fokus penelitian (Adiputra et al., 2021). Penelitian deskriptif merupakan tipe penelitian yang menggambarkan suatu objek maupun subjek secara objektif dan sistematis sesuai dengan fakta dan karakteristik subjek yang diteliti. Penelitian deskriptif merupakan tipe penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan sebuah fenomena alamiah maupun buatan (Arikunto, 2005).

1.7.2 Jangkauan Waktu Penelitian

Jangkauan pada penelitian ini dimulai pada 2016, dimana pada tahun tersebut Australia meluncurkan *Gender Equality and Women's Empowerment Strategy* yang kemudian menjadi kerangka kebijakan bantuan luar negeri dalam rangka mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan (DFAT, 2016). Sementara itu, tahun 2025 dipilih sebagai batas akhir penelitian dikarenakan pada tahun tersebut implementasi *Gender Equality and Women's Empowerment Strategy* berakhir dan digantikan oleh strategi baru yaitu *International Gender Equality Strategy* (DFAT, 2025). Dengan demikian, rentang waktu 2016-2025 relevan untuk mengevaluasi implementasi dari strategi bantuan luar negeri Australia yang mengutamakan kesetaraan gender secara komprehensif.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data yang tidak memberikan informasi secara langsung namun melalui dokumen maupun pihak ketiga. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sebuah situs internet atau dari sebuah referensi yang memiliki keterkaitan dengan topik yang sedang diteliti oleh penulis (Rachman et al., 2024). Data sekunder biasanya terdiri dari data-data yang sudah diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti yang bertujuan untuk mendukung informasi-informasi dari data-data primer yang berasal dari pustaka literatur penelitian sebelumnya buku, dan sumber-sumber lainnya (Sugiyono, 2016). Pengumpulan data sekunder digunakan untuk menggambarkan fenomena implementasi gender terhadap program bantuan luar negeri Australia di Papua Nugini.

1.7.4 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode yang bertujuan untuk memahami sebuah fenomena secara mendalam dan menyeluruh. Dalam pendekatan ini, peneliti berinteraksi secara langsung dengan subjek penelitian untuk memahami lebih luas terkait kehidupan manusia, masyarakat, budaya. Tujuan utama dari metode ini adalah untuk memahami aspek-aspek kompleks dalam kehidupan manusia dengan memberikan ruang untuk menganalisa aspek yang belum tentu bisa diukur menggunakan angka. Metode ini menempatkan peneliti sebagai instrumen utama sehingga tipe penelitian yang menggunakan metode ini umumnya bersifat deskriptif (Rachman et al., 2024)

1.7.5 Sistematika Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan membagi isi penelitian dalam beberapa bagian agar dapat menyediakan hasil penelitian yang lebih terarah:

Bab 1 berisi latar belakang masalah, tinjauan literatur, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, sintesa pemikiran, argumen utama, dan metodologi penelitian.

Bab 2 berisi tentang upaya pemerintah Australia dalam mendorong kesetaraan gender melalui *Gender Equality and Women's Empowerment Strategy* di Papua Nugini dalam aspek ekonomi dan aspek politik.

Bab 3 berisi tentang upaya pemerintah Australia dalam mendorong kesetaraan gender melalui *Gender Equality and Women's Empowerment Strategy* di Papua Nugini dalam aspek pendidikan serta aspek kesehatan.

Bab 4 berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.